

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh

Shinta Liana Fitri^{1*}, Puti Andiny², Yani Rizal³, Safuridar⁴

Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra, Indonesia

Alamat: Jl, Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Langsa City, Aceh 24416

Korespondensi email: shintalianafitri9@gmail.com

Abstract. *Economic growth in Aceh Province is an important issue that shows regional development through the increase in goods and services produced. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Aceh's economic growth only reached an average of 3.88% in 2018, far below the national average of 5.01%, which reflects challenges in resource utilization. Inflation in Aceh has experienced significant fluctuations between 1.53% and 8.09% from 2019 to 2023, which has the potential to hinder economic growth. Government expenditure also plays a crucial role in driving growth, where during the 2019-2023 period, the average development budget reached Rp 12.96 trillion, but the budget realization was only around Rp 12.29 trillion. This shows that despite large expenditures, the impact on economic growth has not been significant. In the theory of economic growth, there are various views on the factors that affect growth. Classical theory emphasizes the role of capital, labor, and technology, while Schumpeter's theory highlights innovation as the main key to growth. Inflation can serve as a barrier or driver, depending on economic conditions, while government spending is expected to stimulate economic growth through an increase in aggregate demand. This study uses inferential statistics to analyze the influence of inflation and government spending on Aceh's economic growth during the 2015-2023 period. The results of the analysis show that government spending has a positive and significant influence on economic growth, while inflation does not show a significant influence.*

Keywords: *Growth, Economy, Aceh, Inflation*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh merupakan isu penting yang menunjukkan perkembangan daerah melalui peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Aceh hanya mencapai rata-rata 3,88% pada 2018, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 5,01%, yang mencerminkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya. Inflasi di Aceh mengalami fluktuasi yang signifikan antara 1,53% hingga 8,09% dari 2019 hingga 2023, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah juga berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan, di mana selama periode 2019-2023, rata-rata anggaran pembangunan mencapai Rp 12,96 triliun, tetapi realisasi anggaran hanya sekitar Rp 12,29 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengeluaran yang besar, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum signifikan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, terdapat beragam pandangan mengenai faktor yang memengaruhi pertumbuhan. Teori klasik menekankan pada peran modal, tenaga kerja, dan teknologi, sedangkan teori Schumpeter menyoroti inovasi sebagai kunci utama pertumbuhan. Inflasi dapat berfungsi sebagai hambatan atau pendorong, tergantung pada kondisi ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Penelitian ini menggunakan statistik inferensial untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode 2015-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: Pertumbuhan, Ekonomi, Aceh, Inflasi

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu isu ekonomi jangka panjang yang menunjukkan perkembangan suatu negara melalui peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, sering diukur melalui produk domestik bruto (GDP) (Manik, 2019). Di tingkat regional, pembangunan daerah menjadi bagian integral pembangunan nasional dengan memanfaatkan otonomi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kabupaten dan kota berperan menggerakkan pemerintahan lokal, sementara provinsi mengkoordinasi kebijakan untuk kepentingan umum, termasuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan stabilitas harga melalui kebijakan fiskal dan moneter (Bachrein, S., 2020). Di Provinsi Aceh, meskipun upaya pembangunan terus dilakukan, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5,3% dalam 10 tahun terakhir, hasil ini mencapai target rata-rata nasional sebesar 5,01%, menunjukkan pemanfaatan sumber daya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang baik (BPS, 2024).

Tabel 1. PDRB Provinsi Aceh atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2023 (jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	Laju perubahan (%)
2014	88,692,064.60	4%
2015	94,910,510.12	5%
2016	101,545,236.83	7%
2017	108,217,625.25	6%
2018	114,552,081.63	6%
2019	121,331,129.65	5%
2020	127,897,069.76	1%
2021	129,092,659.01	6%
2022	137,302,676.83	7%
2023	146,483,352.87	6%

Pendapatan regional bruto (PDRB) mencakup berbagai variabel seperti investasi dan pengeluaran pemerintah, di mana investasi dipengaruhi oleh suku bunga dan PDRB itu sendiri. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, apakah inflasi menghambat atau membantu pertumbuhan. Salah satu penyebab inflasi adalah penggunaan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yang nilainya ditetapkan melalui monopoli negara dan regulasi, namun nilainya sulit dijaga karena pemerintah masih memiliki utang dan beban bunga kepada Bank Sentral. Inflasi di Provinsi Aceh terus mengalami fluktuasi yang berkisar dari 1,53% sampai dengan 8,09% sepanjang tahun 2014- 2023 seperti pada Tabel 3

Tabel 2. Inflasi di Provinsi Aceh Tahun 20194-2023 (Persen)

Tahun	Inflasi
2014	6,20
2015	6,75
2016	7,00
2017	7,15
2018	7,25
2019	7,31
2020	8,09
2021	1,53
2022	3,95
2023	4,25

Tabel tersebut menunjukkan laju inflasi tahunan di Provinsi Aceh dari tahun 2014 hingga 2023. Selama periode ini, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat inflasi, dengan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2020, diikuti oleh penurunan yang signifikan pada tahun 2021, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada awal periode, inflasi di Aceh berada di 6,20% pada tahun 2014 dan terus meningkat, mencapai puncaknya pada 8,09% di tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga yang berkelanjutan dalam ekonomi daerah tersebut. Namun, pada tahun 2021, inflasi menurun tajam menjadi 1,53%, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi khusus atau kebijakan ekonomi tertentu. Setelah itu, inflasi kembali meningkat menjadi 3,95% pada tahun 2022 dan sedikit lebih tinggi pada 4,25% di tahun 2023. Perkembangan inflasi ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di Provinsi Aceh, dengan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat harga di wilayah tersebut sepanjang tahun-tahun tersebut.. Selain investasi dan inflasi, pengeluaran pemerintah juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai alat intervensi efektif dalam mendorong PDRB dan menekan pengangguran serta kemiskinan (Ratih, Utama, dan Yasa, 2017). Selama 2019-2023, Provinsi Aceh menetapkan rata-rata anggaran pembangunan Rp 12,96 triliun dengan realisasi sekitar Rp 12,29 triliun.

Tabel 3. Anggaran Pembangunan Menurut Sumber Dana di Provinsi Aceh (Rupiah), Tahun 2019-2023

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2014	10,123,456,789,234	9,987,654,321,234
2015	10,457,123,456,012	10,200,987,654,644
2016	10,798,987,654,064	10,556,123,789,754
2017	11,234,567,890,342	10,978,543,210,241
2018	11,762,345,678,135	11,523,456,789,103
2019	11,304,334,440,412	11,217,741,311,905
2020	12,939,644,749,248	12,045,847,341,692
2021	12,749,671,570,835	12,239,684,708,001
2022	12,874,631,946,619	12,119,713,196,647
2023	14,911,632,809,908	13,832,500,610,368
Rata-rata	12,955,983,103,404	12,291,097,433,723

Selama 2014-2023, pagu anggaran pembangunan di Provinsi Aceh tumbuh rata-rata 6,96%, namun realisasi anggaran hanya tumbuh 5,32%, menyebabkan pengeluaran daerah yang besar belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi dari Wait Whitman Rostow, pertumbuhan ini memerlukan investasi besar atau *big push* (Ardani, 2019). Pengeluaran pemerintah Provinsi Aceh berfluktuasi dari 2019 hingga 2023, sementara pertumbuhannya tidak stabil, dengan penurunan signifikan dari 2021 hingga 2022, kemudian mengalami kenaikan pada 2022 hingga 2023.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh pengeluaran pemerintah dan laju inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Penelitian ini ingin mengidentifikasi hubungan signifikan antara pengeluaran pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi fiskal dengan dinamika inflasi yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengevaluasi seberapa besar peran kedua variabel tersebut dalam memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan gambaran empiris yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Aceh.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kegiatan ekonomi yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, sehingga kemakmuran masyarakat juga meningkat (Sukirno, 2020). Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan faktor-faktor produksi seperti investasi pada barang modal dan teknologi, yang meningkatkan lapangan kerja sebagai respon terhadap pertumbuhan populasi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi mencakup pandangan berbagai ekonom. Teori klasik, yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor seperti penduduk, modal, tanah, dan teknologi. Sementara Smith optimis tentang pertumbuhan berkelanjutan melalui mekanisme pasar, Ricardo dan Mill memperkirakan bahwa ekonomi akan mencapai kondisi stagnan dalam jangka panjang saat mencapai *stationary state* (Mughtar, 2023).

Schumpeter memandang pengusaha sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi melalui inovasi yang menciptakan investasi baru dan menggerakkan ekonomi (Famisda, 2018). Teori Harrod-Domar berfokus pada permintaan, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan peningkatan pengeluaran agregat melalui investasi. Teori ini mensyaratkan bahwa kapasitas modal tercapai penuh, tabungan proporsional dengan pendapatan nasional, dan rasio modal-produksi konstan (Rahayu, 2020). Model pertumbuhan Solow, yang termasuk dalam teori neoklasik, menekankan pada peran modal dan tenaga kerja dalam jangka panjang serta faktor teknologi sebagai variabel eksternal. Menurut Solow, ekonomi akan mencapai keseimbangan jangka panjang saat pertumbuhan modal dan tenaga kerja stabil, sedangkan teknologi dianggap eksogen dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Model pertumbuhan endogen mencoba memperbaiki hal ini dengan memasukkan perkembangan teknologi dalam model pertumbuhan, di mana

kemajuan teknologi memungkinkan ekonomi tumbuh secara positif (Athallah & Masbar, 2023).

Inflasi

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan harga secara terus-menerus, yang menyebabkan penurunan nilai uang akibat bertambahnya jumlah uang beredar tanpa diimbangi peningkatan barang dan jasa (Sitanggang dan Munthe, 2019). Inflasi dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yang meliputi inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun), inflasi menengah (10-30% per tahun), inflasi berat (30-100% per tahun), dan inflasi sangat tinggi (*hyperinflation*, di atas 100%). Klasifikasi lainnya adalah berdasarkan sebab-sebab terjadinya inflasi, seperti *demand pull inflation*, *cost push inflation*, dan *bottle neck inflation*. *Demand pull inflation* terjadi ketika permintaan melebihi penawaran, mendorong harga naik, sementara *cost push inflation* disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. *Bottle neck inflation* muncul ketika permintaan tetap tinggi meskipun kapasitas produksi sudah maksimal. Selain itu, inflasi juga dapat dibedakan berdasarkan asalnya: inflasi domestik (dari dalam negeri) yang muncul karena defisit dalam belanja negara dan inflasi impor (*imported inflation*) yang dipicu oleh inflasi di negara mitra dagang yang berdampak pada biaya produksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi meliputi teori kuantitas, yang menyatakan inflasi muncul dari peningkatan jumlah uang yang beredar. Semakin besar uang yang beredar, semakin tinggi inflasi. Selain itu, perkiraan masyarakat mengenai kenaikan harga dapat menyebabkan lonjakan permintaan, yang pada gilirannya mendorong harga naik. Teori strukturalis menyoroti masalah yang lebih mendasar dalam struktur ekonomi, terutama dalam hal produksi yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan, menyebabkan kenaikan harga barang, terutama bahan makanan dan barang ekspor. Kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan adalah ciri inflasi, yang berbeda dengan deflasi, yaitu penurunan harga. Inflasi dapat muncul akibat tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*) dan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), serta ekspektasi inflasi yang dipengaruhi oleh perilaku pelaku ekonomi. Momen tertentu, seperti menjelang hari raya atau penetapan upah minimum, dapat menyebabkan kenaikan harga meskipun pasokan barang mencukupi, menciptakan inflasi yang tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi (Siregar, 2019).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat. Total pengeluaran pemerintah adalah

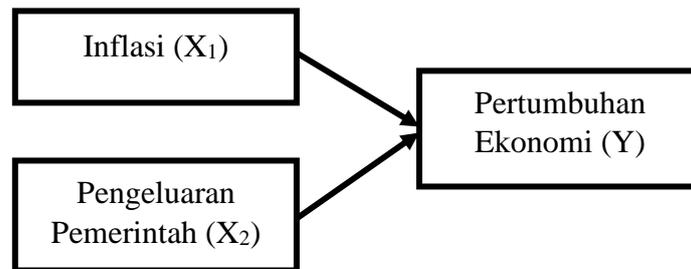
hasil penjumlahan dari anggaran di semua tingkat pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan daerah (Rustiono, 2018). Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pendapatan daerah dan meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat menarik investasi dan meningkatkan produksi. Pengeluaran pemerintah juga merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yang mengatur jalannya perekonomian melalui penentuan besaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun, yang tercermin dalam dokumen APBN dan APBD (Sitaniapessy, 2018). Kebijakan fiskal bertujuan untuk menstabilkan harga, output, kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja, terutama ketika ekonomi tidak sepenuhnya dapat diatur oleh pasar bebas.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah ditetapkan dan mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain melakukan pengeluaran, pemerintah juga memperoleh penerimaan, yang menjadi bagian dari konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Peran pemerintah dapat dilakukan melalui intervensi langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi, guna merangsang pertumbuhan dan menghindari kegagalan pasar (Sayifullah dan Emmalian, 2018). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah dapat dianggap sebagai indikator besar kegiatan pemerintah yang didanai oleh pengeluaran tersebut (Afiat, 2019). Pengeluaran pemerintah terdiri dari beberapa pos utama, termasuk pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, gaji pegawai, dan transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada warga tanpa membeli barang atau jasa secara langsung, seperti subsidi dan bantuan sosial, yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan mirip dengan pengeluaran gaji pegawai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan statistik inferensial untuk mengambil keputusan mengenai karakteristik populasi yang dikaji, dengan fokus pada Provinsi Aceh selama periode delapan tahun (2015-2023). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series), termasuk data pertumbuhan ekonomi (PDRB Aceh), inflasi (indeks harga konsumen), dan pengeluaran pemerintah. Semua data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan telah diinterpolasi dari tahunan ke kuartalan. Variabel penelitian terdiri dari dua kategori: variabel terikat (dependent variable) yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

selama periode 2010-2018, dan variabel bebas (independent variables) yang mencakup inflasi dan pengeluaran pemerintah selama periode 2015-2023. Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, dengan menggunakan perangkat lunak E-Views untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini (Sugiyono, 2019).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik deskriptif berguna untuk memberikan informasi sekilas tentang variable penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel dalam penelitian. Hasil analisis Statistik deskriptif yang di peroleh pada penelitian ini di paparkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik deskriptif

	Y (juta rupiah)	X ₁ (%)	X ₂ (juta rupiah)
Mean	0.7550.00	1.013333	4.4900000
Max	4.610000	8.090000	2.4500000
Std.dev	1.449943	2.187381	9.0200000
Observasi	10	10	10

Data yang disajikan menunjukkan statistik deskriptif untuk tiga variabel: pertumbuhan ekonomi (Y), inflasi (X₁), dan pengeluaran pemerintah (X₂) di Provinsi Aceh. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode yang dianalisis adalah 0,755 juta rupiah, dengan nilai maksimum mencapai 4,61 juta rupiah dan deviasi standar sebesar 1,45 juta rupiah, menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Inflasi, yang diukur dalam persentase (X₁), memiliki rata-rata sebesar 1,01%, dengan nilai maksimum 8,09% dan deviasi standar 2,19%, mencerminkan fluktuasi yang terjadi dalam tingkat inflasi di daerah tersebut. Sementara itu, pengeluaran pemerintah (X₂) tercatat dengan rata-rata 4,49 juta rupiah, maksimum 2,45 juta rupiah, dan deviasi standar sebesar 9,02 juta rupiah, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah selama periode yang

dianalisis. Secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Kemudian Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variable terikat sama variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

Tabel 5. Uji normalitas

Jarque-Bera	5.327907
Probability	0.000000

Hasil uji Jarque-Bera pada table 4.2 diatas menunjukkan nilai Probability sebesar 0.000000. Hasil menunjukkan bahwa nilai prob < 0.10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Artinya, data berdistribusi normal. Lalu, Uji Multikolinieritas bertujuan untuk untuk menguji keberadaan korelasi antara variabel independent dan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.

Tabel 6. Uji normalitas

	Y	X ₁	X ₂
Y	1.00000 0	0.67666 3	0.68431 1
X ₁	0.67666 3	1.00000 0	0.88562 1
X ₂	0.68431 1	0.88562 1	1.00000 0

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel independent < 0.90 yang artinya tidak terjadi hubungan Multikolinieritas. Selanjutnya, Uji Heteroskedastisitas merupakan uji yang menunjukkan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Uji Glejser ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai abosulte residual dengan variabel – variabel independent dalam model.

Tabel 7. Uji heterokedastisitas

Alpha	0.10
Obs*R-square	11.21865

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada table 4.4 menunjukkan nilai Obs*R-squared lebih besar $\alpha = 10\%$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. Dilanjutkan dengan uji Autokorelasi di gunakan untuk menguji kestasioneran data dengan melihat hasil Plot Auto Correlation function (ACF) dan partial Auto Correlation Function (PACF).

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q Stat	Prob
. *****	. *****	1	0.746	0.746	21.769	0.000
. ***	. *	2	0.474	-0.188	30.791	0.000
. **	.	3	0.282	0.006	34.091	0.000
. **	. ***	4	0.352	0.441	39.378	0.000
. ***	. *	5	0.401	-0.078	46.457	0.000
. ***	.	6	0.381	-0.033	53.059	0.000
. **	. *	7	0.217	-0.104	55.280	0.000
.	. *	8	0.062	-0.129	55.471	0.000
. *	. *	9	-0.070	-0.174	55.717	0.000
. *	.	10	-0.077	0.020	56.033	0.000
. *	. *	11	-0.085	-0.090	56.430	0.000
. *	.	12	-0.093	-0.032	56.923	0.000
. *	. *	13	-0.101	0.197	57.526	0.000
. *	.	14	-0.108	-0.030	58.257	0.000
. *	.	15	-0.116	0.022	59.137	0.000
. *	.	16	-0.124	0.043	60.188	0.000

Berdasarkan pada gambar 4.5 diketahui nilai probability < 0.10 yang artinya model regresi tidak mengalami autokorelasi. Data yang dipilih berarti kita menerima H_0 dan menolak H_a . Selanjutnya kita akan menguji menggunakan Regresi linier berganda merupakan pemodelan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent yang lebih dari suatu variabel.

Tabel 9. Regresi linier berganda

Dependent Variable: Y					
Method: Least Squares					
Date: 12/27/19 Time:					
10:03 Sample: 2010Q1					
2018Q4					
Included observations: 36					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	0.164191	0.169976	0.965965	0.3413	
INF	-0.076042	0.169075	-0.449752	0.6559	
G	8.21E-19	3.67E-19	2.234495	0.0326	
R-squared	0.646820	Mean dependent var	0.755000		
Adjusted R-squared	0.613710	S.D. dependent var	1.449943		
S.E. of regression	0.901172	Akaike info criterion	2.734198		
Sum squared resid	25.98756	Schwarz criterion	2.910145		
Log likelihood	-45.21557	Hannan-Quinn criter.	2.795608		
F-statistic	19.53515	Durbin-Watson stat	0.938786		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Pada uji signifikansi parsial, variabel inflasi menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,449752, yang lebih kecil dari t tabel 1,667, dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,6559. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,10, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak, mengindikasikan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, variabel pengeluaran pemerintah

(X_2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,234495, yang lebih besar dari t tabel 1,667, dengan nilai signifikansi 0,0326. Hal ini mengarah pada penerimaan hipotesis alternatif (H_1) dan penolakan hipotesis nol (H_0), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pada uji signifikansi simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 19,53515, yang lebih besar daripada F tabel 0,0326 pada tingkat kepercayaan 10%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa $19,53515 > 0,326$ menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diuji secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil ini menegaskan bahwa baik inflasi maupun pengeluaran pemerintah, secara bersama-sama, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pembahasan

Inflasi merupakan indikator krusial dalam analisis perekonomian suatu negara, dengan dampak yang luas terhadap variabel makroekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan. Berdasarkan hasil analisis regresi, inflasi memiliki nilai probabilitas lebih dari 10%, yaitu 0,6559, yang menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugrahani (2023), yang juga menemukan bahwa inflasi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mengatur perekonomian melalui penetapan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat dan, pada gilirannya, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Hasil penelitian yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat memberikan wawasan penting tentang efektivitas alokasi anggaran publik dalam mendorong aktivitas ekonomi. Secara umum, pengeluaran pemerintah yang optimal seharusnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di Aceh telah berhasil mendorong aktivitas ekonomi, baik melalui peningkatan daya beli masyarakat maupun penciptaan lapangan kerja. Misalnya, investasi

dalam infrastruktur transportasi atau energi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi daerah, sementara alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berperan penting dalam stimulasi kegiatan ekonomi. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, hal ini tidak hanya mendukung proyek-proyek pembangunan dan penyediaan layanan publik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta dan investasi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, dengan nilai probabilitas yang lebih tinggi dari 10%. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa inflasi tidak memberikan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun inflasi adalah indikator penting dalam analisis perekonomian, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh tidak sekuat yang diharapkan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya berfungsi untuk mendukung proyek-proyek pembangunan dan layanan publik, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang efektif dan responsif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi serta perkembangan sektor swasta di daerah tersebut.

REFERENSI

Afiat, M. N. (2019). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga.
- Athailah, A. H., & Masbar, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*.
- Bachrein, S. (2020). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*.
- Famisa, N. (2018). Pengaruh Investasi, Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur.
- Manik, T. (2019). Analisis pengaruh kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, inflasi, intergovernmental revenue dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.
- Muchtar, E. H. (2023). Perkembangan Tasyri'Ekonomi Pada Masa Khulafa 'Urrasyidin. *Jurnal Asy-Syukriyyah*.
- Nugrahani Pramesthi, R. O. V. I. A. (2023). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten trenggalek. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Rahayu, T. I. (2020). Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar (Tabungan Dan Investasi). *Jurnal Gema Eksos*.
- Ratih, G. P. A., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Rustiono, Deddy. (2018). Analisis penengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro: Thesis.
- Siregar, S. (2019). Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Sitanggang, H., & Munthe, K. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2013-2016. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Sitaniapessy, Harry A.P. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.